

**KONTRIBUSI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DALAM MENDUKUNG
PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI
PEMBERDAYAAN UKM DI INDONESIA
(STUDI KASUS: PROGRAM UKM BOGASARI)**

TESIS



Oleh:

Otniel Christofer

2016891013

Pembimbing :

Dr. I Nyoman Sudira

**PROGRAM MAGISTER HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI 2019**

**KONTRIBUSI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DALAM MENDUKUNG
PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI
PEMBERDAYAAN UKM DI INDONESIA
(STUDI KASUS: PROGRAM UKM BOGASARI)**

TESIS



Oleh:

Otniel Christofer

2016891013

Pembimbing :

Dr. I Nyoman Sudira

**PROGRAM MAGISTER HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI 2019**

**KONTRIBUSI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DALAM MENDUKUNG
PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI
PEMBERDAYAAN UKM DI INDONESIA
(STUDI KASUS: PROGRAM UKM BOGASARI)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Dapat Mengikuti Sidang Tesis



Oleh:

Otniel Christofer

2016891013

Pembimbing :

Dr. I Nyoman Sudira

**PROGRAM MAGISTER HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KONTRIBUSI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR) DALAM Mendukung Pengentasan Kemiskinan
Melalui Pemberdayaan UKM di Indonesia (Studi Kasus:
Program UKM Bogasari)**



Oleh:

Otniel Christofer

2016891013

Persetujuan Untuk Sidang Tesis pada Hari/Tanggal:

Jumat, 11 Januari 2019

Pembimbing:

Dr. I Nyoman Sudira

**PROGRAM MAGISTER HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI 2019**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Otniel Christofer
Nomor Pokok Mahasiswa : 2016891013
Program Studi : Magister Hubungan Internasional
Program Pascasarjana
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

"Kontribusi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UKM di Indonesia (Studi Kasus: Program UKM Bogasari)"

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung
Tanggal : 7 Januari 2019

Otniel Christofer

**Kontribusi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam
Mendukung Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UKM di
Indonesia (Studi Kasus: Program UKM Bogasari)**

**Otniel Christofer (NPM: 2016891013)
Pembimbing: Dr. I Nyoman Sudira
Magister Hubungan Internasional
Bandung
Januari 2019**

ABSTRAK

Pemberdayaan UKM merupakan salah satu strategi dari Pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sektor ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk memberdayakan sektor UKM, Pemerintah Indonesia memiliki beberapa program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Dana Bergulir KEMENKOPUKM, Gerakan Kewirausahaan Nasional, UKM Go Online, dan Pajak UKM 0,5%. Namun, pelaksanaan dari program-program tersebut belum dapat memberikan hasil yang maksimal dikarenakan oleh keterbatasan dari program-program ini yang belum mencakup aspek untuk mengelola dan mengembangkan bisnis dari para pelaku UKM. Oleh karena itu diperlukan partisipasi dari aktor lain yang memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis untuk membimbing para pelaku UKM mencapai hal tersebut. Salah satu aktor di Indonesia yang dapat mewujudkan hal tersebut adalah PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melalui program CSR-nya yaitu Program UKM Bogasari. Pertanyaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana Kontribusi dari Program UKM Bogasari dalam Memberdayakan UKM di Indonesia?". Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan *stakeholders theory* dan konsep kemiskinan, *development assistance*, program CSR, serta konsep pemberdayaan dalam bentuk kemitraan. Dari penelitian ini penulis menemukan bahwa Program UKM Bogasari berkontribusi melalui pemberian manfaat bagi para pelaku UKM yang berpartisipasi dalam program seperti pelatihan secara berkala, perluasan akses pasar, fasilitas asuransi, koneksi bisnis dengan lembaga pendanaan. Selain itu penulis juga menemukan bahwa Program UKM Bogasari juga berkontribusi dalam mengisi keterbatasan program Pemerintah yaitu dalam aspek mengelola dan mengembangkan bisnis. Kontribusi dalam aspek ini adalah dalam hal manajemen keuangan, peningkatan citra merk atau *branding*, dan peningkatan kualitas produk.

Kata Kunci: Pengentasan kemiskinan di Indonesia, UKM, pemberdayaan UKM di Indonesia, , kontribusi, Program UKM Bogasari

Contribution of Corporate Social Responsibility (CSR) Program in Supporting Poverty Alleviation Through SME Empowerment in Indonesia (Case Study: Program UKM Bogasari)

Otniel Christofer (NPM: 2016891013)

***Advisor: Dr. I Nyoman Sudira
Master of International Relations
Bandung***

January 2019

ABSTRACT

SME Empowerment is one of the strategies by Indonesian Government to alleviate poverty in the National Medium Term Development 2015-2019. This sector plays an important role in promoting the national economic growth, and to empower the SME. the Indonesian Government did some programs such as the Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program, The SME and Cooperation Ministry's Revolving Fund, National Entrepreneurship Movement, SME Go Online, and Reducing the tax to SME to 0,5%. However, these programs haven't produce a maximal outcome due to several limitation such as helping the SME performer manage their business so they can become part of the bigger industries. To resolve that problem, there must be some kind cooperation between the Government and non-government actors that have the knowledge and expertise to help the SME performer to manage and expand their business so they can be a part of the bigger industry. One of the actors in Indonesia that can help the SME performer resolve that problem is PT. Indofood Sukses Makmur Tbk through one of their CSR Programs: Program UKM Bogasari. The research question used in this research is "How Program UKM Bogasari can contribute to the SME Empowerment in Indonesia?". and to answer that question, this research use the stakeholders theory and concept of poverty, development assistance, CSR Program, and partnership as a form of empowerment. From this research, the writer found that Program UKM Bogasari contribute to the SME empowerment in Indonesia by giving benefits to the participants of the program. Those benefits are periodic training program, access to bigger market, insurance, business network such as network with bank, and several other benefits. Furthermore, the writer found that Program UKM Bogasari also contribute in covering the Government limitation to help the SME doer manage their business. This contribution come in form of guidance on managing the financial aspect, branding, and on improving the product quality.

Keywords: Poverty alleviation in Indonesia, SME, SME Empowerment in Indonesia, contribution, Program UKM Bogasari

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu selama proses penulisan yaitu: *Jesus Christ. Thanks father for always listening to my thoughts and prayers, and for always becoming the light in my journey.* Keluarga penulis: mami, papi, cici, Rachel, ko Wandy, Davin. Kepada Maria Jessica Hertania. *Thank you for always being there for me.* Kepada Dr. I Nyoman Sudira sebagai pembimbing atas ilmu dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis. Kepada Dr. phil. Aknolt K. Pakpahan atas segala masukan dan waktu untuk berkonsultasi dan menguji tesis ini serta Dr. A. Irawan J.H. selaku penguji dari tesis ini. Kepada Staff akademik dan administrasi FISIP UNPAR terutama Mas Heru dan Mas Andre. Kepada Bapak Axton Salim, Bapak Indrayana, Bapak Pandiono atas waktunya sudah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini. Keluarga besar Two Hands Full Coffee Roasters dan Susan. Kepada teman-teman M.HI UNPAR terutama Dyah Ayunda yg menjadi teman seperjuangan penulis selama menempuh studi.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan memohon maaf atas hal tersebut. Besar harapan penulis, bahwa kelak penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

Bandung 2019

Otniel Christofer

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Perumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.5.1 Tujuan Penelitian	11
1.5.2 Kegunaan Penelitian	11
1.6 Kajian Literatur	12
1.7 Kerangka Pemikiran	16
1.8 Metodologi Penelitian	36
1.8.1 Teknik Pengumpulan Data	37
1.9 Sistematika Pembahasan	38

BAB II Penerapan Nilai Sosial dalam Aktivitas Bisnis PT. Indofood Sukses

Makmur Tbk	41
2.1 Nilai-Nilai dalam Aktivitas Bisnis PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	41
2.2 Program CSR Sebagai Bentuk Aplikasi Nilai Sosial PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.....	43
2.3 Program <i>Social and Community Development</i> PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	45
2.4 Program UKM Bogasari.....	48
2.4.1 Bogasari <i>Baking Centre</i>	50
2.4.2 Bogasari <i>Mitra Card</i>	52
2.4.3 Wacana Mitra.....	53

BAB III Strategi Pengentasan Kemiskinan & Pemberdayaan UKM di

Indonesia	55
3.1 Terkait Kemiskinan di Indonesia.....	55
3.2 Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.....	59
3.3 Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia	62
3.3.1 Program Pemberdayaan UKM di Indonesia	66

BAB IV Kontribusi Program UKM Bogasari dalam Mendukung	
Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UKM di Indonesia.....	75
4.1 Kontribusi Program UKM Bogasari dalam Mendukung Pemberdayaan	
UKM di Indonesia	76
4.2 Aplikasi <i>Stakeholders Theory</i> dalam Program CSR PT. Indofood Sukses	
Makmur Tbk.....	90
4.3 Aplikasi <i>Charity Principle</i> dan <i>Stewardship Principle</i> Melalui Program	
CSR	
.....	94
BAB V Kesimpulan	98
LAMPIRAN.....	102
Lampiran wawancara dengan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	102
Lampiran wawancara dengan Paguyuban Mie Ayam Tunggal Rasa	110
DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Piramida CSR Carroll dan Buchholtz	31
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kontribusi dari Program UKM Bogasari dalam mendukung pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Kehadiran dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian di suatu negara terutama bagi negara-negara sedang berkembang.¹ Di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, sektor UKM memiliki potensi untuk menyumbang 60,34% dari produk domestik bruto (PDB) yang diterima oleh negara, dan mampu untuk menyerap 114 juta tenaga kerja dari 117,68 tenaga kerja yang ada di Indonesia.² Potensi yang dimiliki oleh sektor ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

¹ Charles Havie, (2005), *"The Contribution of Micro-Enterprises to Regional Economic Recovery and Poverty Alleviation in East Asia"* dalam Charles Havie dan Boon-Chye Lee, (2005), *Sustaining Growth and Performance in East Asia: The Role of Small and Medium Sized Enterprises*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, hal.74.

² Dani Jumadil Akhir, *Jadi Sektor Strategis, UMKM Dapat Perangi Kemiskinan*, Okezone Finance
<https://economy.okezone.com/read/2017/09/15/320/1776902/jadi-sektor-strategis-umkm-dapat-perangi-kemiskinan> diakses pada 24 September 2018.

menjadikan pemberdayaan UKM sebagai salah satu strategi yang ditempuh oleh Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (RPJMN 2015-2019).³ Sektor ini memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya dapat berkontribusi kepada peningkatan pendapatan negara.⁴

Salah satu strategi yang disusun oleh Presiden Jokowi untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia adalah melalui pemberdayaan sektor UKM. Tulus Tambunan menyebutkan bagi negara-negara berkembang di Asia termasuk Indonesia, kehadiran dari sektor UKM memiliki peranan krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan aktivitas ekspor, serta mendorong munculnya *entrepreneur* baru dan aktivitas ekonomi di wilayah rural.

Namun, di Indonesia kehadiran dari sektor UKM belum mampu untuk memberikan dampak yang maksimal dalam mewujudkan upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh beberapa tantangan bagi para pelaku UKM untuk dapat mengembangkan usaha mereka seperti (i) bahan baku yang tinggi (ii) keterbatasan modal dan akses terhadap pendanaan (iii) kesulitan pemasaran dan distribusi (iv) upah buruh yang tinggi (v) peraturan pemerintah (vi) kurangnya tenaga ahli dan teknologi penunjang

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Buku I, Bab.4 hal.11.

⁴ Tulus Tambunan, (2009), *SMEs in Asian Developing Countries*, New York: Palgrave Macmillan hal.1.

produksi.⁵ Melihat beberapa tantangan ini, Pemerintah membentuk beberapa program untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Gerakan Kewirausahaan Nasional, hingga Pajak UKM 0,5%. Sejauh ini, program-program pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ditujukan untuk mendukung kemunculan dari para pelaku UKM baru.

Berdasarkan tujuannya, program-program ini dapat menjadi sumber pendanaan yang baik bagi kelompok masyarakat miskin untuk memperoleh pendanaan dan dapat memulai usaha, namun dampak dari program-program ini untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan belum memasuki ranah sebagai bantuan untuk meningkatkan skala aktivitas ekonomi dari para pelaku UKM. Hal ini dikarenakan oleh adanya tantangan lain yang dihadapi oleh para pelaku UKM yaitu dalam hal mengelola dan mengembangkan bisnis mereka agar dapat memiliki keberlanjutan. Di Indonesia, Sektor UKM yang ada masih didominasi oleh badan usaha yang sangat kecil.⁶ Melihat potensi yang dimiliki, maka diperlukan suatu upaya untuk membimbing para pelaku di sektor UKM untuk dapat mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan adanya kontribusi dari aktor lainnya yang memiliki pengalaman di

⁵ Tulus Tambunan, *Development and Some Constraint of SME in Indonesia*, https://www.rieti.go.jp/en/events/10100101/pdf/5-5_tambunan_paper_en.pdf diakses pada 15 November 2018

⁶ OECD, (2018), *SME and Entrepreneurship Policy in Indonesia 2018*, Paris: OECD Publishing, hal.150.

dalam bisnis untuk dapat mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan UKM.

Salah satu aktor yang memiliki kemampuan untuk menutupi keterbatasan tersebut adalah aktor dalam bentuk perusahaan besar. Aktor ini dalam kegiatan sehari-harinya memiliki tuntutan utama yaitu memperluas pasar dan memperoleh keuntungan. Sehingga dalam hal untuk mengelola dan mengembangkan usaha, dapat dikatakan bahwa aktor ini memiliki kemampuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk membimbing para pelaku UKM untuk dapat mengelola dan mengembangkan usaha mereka. Pemerintah sebagai aktor utama dalam suatu dinamika politik, dapat menggunakan kekuatan yang ia miliki untuk mempengaruhi aktor dari sektor bisnis untuk berpartisipasi dalam mensukseskan strategi yang disusun ini oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Salah satu kerangka yang dapat dipakai oleh Pemerintah adalah dengan menjadikan kemitraan antara perusahaan besar dengan pelaku UKM sebagai kewajiban bagi perusahaan besar melalui undang-undang, seperti yang terjadi dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berisikan ketentuan mengenai kemitraan dengan industri yang lebih besar atau UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang berisikan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.⁷

Aktor bisnis dapat berkontribusi dalam mendukung upaya pemerintah melalui kerangka program CSR, yang merupakan bagian dari aktivitas bisnis

⁷ Andrew Rosser dan Donni Edwin, 2010, *The Politics of Corporate Social Responsibility in Indonesia*, dalam *The Pacific Review* Vol.23 No.1, hal.4.

perusahaan yang menggabungkan nilai-nilai sosial ke dalamnya. Salah satu aktor dalam sektor bisnis di Indonesia yang memiliki program pemberdayaan UKM sebagai bagian dari program CSR mereka adalah PT. Indofood Sukses Makmur Tbk atau Indofood melalui Program UKM Bogasari. Program ini memiliki bentuk kemitraan dimana perusahaan membentuk kemitraan dengan para pelaku UKM yang dikenal sebagai mitra UKM Bogasari. Melalui kemitraan ini, para mitra UKM mendapatkan berbagai pelatihan untuk menghasilkan produk-produk berkualitas, bantuan *networking* dengan *stakeholders* lain yang dibutuhkan seperti bank atau lembaga asuransi, hingga bimbingan untuk mengembangkan usaha mereka seperti penggunaan teknologi dan cara meningkatkan citra merk atau *branding* dari produk-produk para pelaku UKM. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk memberikan deskripsi mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh Program UKM Bogasari dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui pemberdayaan UKM.

1.2 Identifikasi Masalah

Kehadiran dari sektor UKM di Indonesia belum dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung upaya Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh berbagai kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku UKM di Indonesia seperti: (i) bahan baku yang tinggi (ii) keterbatasan modal dan akses terhadap pendanaan (iii) kesulitan pemasaran dan distribusi (iv) upah buruh yang tinggi (v) peraturan pemerintah (vi) kurangnya tenaga ahli dan teknologi penunjang produksi.⁸ Tantangan-tantangan ini telah dicoba untuk dijawab oleh Pemerintah melalui beberapa programnya seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Gerakan Kewirausahaan Nasional serta Pajak UKM 0,5%. Namun, hasil dari program-program ini belum maksimal dikarenakan oleh berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh program-program Pemerintah.

Permasalahan yang muncul dari pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Pemerintah adalah program-program yang disusun oleh Pemerintah Indonesia cenderung memiliki tujuan terbatas untuk melahirkan pelaku-pelaku UKM baru. Sehingga masih terdapat aspek-aspek yang belum dapat diisi oleh program Pemerintah Indonesia yaitu dalam aspek mengelola dan mengembangkan aktivitas bisnis dari pelaku UKM. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk dukungan dan bantuan dari aktor-aktor lain yang dilengkapi dengan pengetahuan dan pengalaman

⁸ Tulus Tambunan, *Development and Some Constraint of SME in Indonesia*, https://www.rieti.go.jp/en/events/10100101/pdf/5-5_tambunan_paper_en.pdf diakses pada 15 November 2018.

yang dibutuhkan untuk mensukseskan strategi Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan sektor UKM dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.⁹

Salah satu dari berbagai aktor yang dapat memberikan dukungan kepada strategi Pemerintah Indonesia dalam memberdayakan sektor UKM di Indonesia adalah aktor dari sektor bisnis dalam bentuk perusahaan baik itu perusahaan domestik maupun perusahaan multinasional. Bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh sektor bisnis adalah melalui program *corporate social responsibility* (CSR). Program ini merupakan bagian dari aktivitas bisnis perusahaan yang mencoba untuk menggabungkan nilai-nilai sosial sebagai bagian dari aktivitas bisnis perusahaan. Sehingga dalam prosesnya, selain dapat menjalankan fungsinya sebagai suatu unit ekonomi, kehadiran dari perusahaan juga dapat berkontribusi bagi keberlangsungan dari komunitas dan lingkungan sekitar. Dalam hal memberdayakan sektor UKM, kehadiran dari perusahaan dalam sektor bisnis dapat berkontribusi untuk menjadi pembimbing bagi para pelaku UKM untuk mengembangkan dan mengelola usaha mereka melalui pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang dimiliki oleh sektor bisnis sehingga dapat membantu pelaku UKM untuk memperkuat nilai ekonomi mereka dan pada akhirnya dapat mendukung strategi Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Salah satu perusahaan di Indonesia yang memiliki program CSR dalam bentuk pemberdayaan UKM adalah PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melalui

⁹ Koran Jakarta, *Atasi Ketimpangan, Butuh Kerjasama Pemerintah-Swasta*, <http://www.koran-jakarta.com/atasi-ketimpangan--butuh-kerja-sama-pemerintah-swasta/> diakses pada 4 November 2018.

Program UKM Bogasari. Program ini merupakan suatu bentuk kemitraan antara Indofood dengan pelaku UKM yang berbasis makanan. Sejauh ini, sebanyak 51.381 pelaku UKM telah berpartisipasi di dalam program ini dan memperoleh manfaat antara lain dalam bentuk pelatihan, potongan harga, rekomendasi kredit mikro, perluasan akses pasar. Sehingga melalui partisipasi dari program ini, perusahaan mencoba untuk berkontribusi dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UKM.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang muncul untuk menjadi bahan dari penelitian ini adalah: dampak dari upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia belum dapat memberikan hasil maksimal karna hanya terbatas untuk mendorong munculnya pelaku UKM baru dan belum memasuki tahapan dapat membantu para pelaku UKM untuk dapat mengelola dan mengembangkan bisnis mereka seperti dalam hal kemampuan untuk mengelola produk, pengetahuan, manajemen, kualitas produk, dan beberapa aspek lainnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan membatasi kepada *stakeholders theory* oleh R. Edward Freeman dkk, prinsip dari program CSR menurut James E. Post dkk, tahapan dari suatu program CSR menurut Archie B. Carroll dan Ann K. Buchholtz, konsep *development assistance* dalam bentuk *private aid* untuk menjelaskan mengenai kontribusi dari sektor privat untuk membantu menyelesaikan permasalahan terkait kemiskinan, dan konsep pemberdayaan melalui kemitraan untuk menjelaskan bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Indofood melalui Program UKM Bogasari. Jenis UKM yang dipilih dalam penelitian ini adalah UKM berbasis pangan yang menggunakan tepung terigu sebagai bahan baku. Untuk data yang digunakan, akan dibatasi hanya kepada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta data yang didapatkan melalui wawancara dengan pelaksana dan partisipan dari program sekaligus data melalui literatur, dokumen, situs resmi, dan situs berita. Sedangkan untuk metodologi, yang digunakan adalah metodologi kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus.

Isu yang menjadi bahasan dari penelitian ini adalah isu kemiskinan dalam bentuk *relative poverty* yang merupakan kondisi kemiskinan yang dialami seseorang dikarenakan tingkat pendapatannya berada di bawah standar nasional. Sedangkan untuk program pengentasan kemiskinan Pemerintah Indonesia yang dipilih adalah melalui program pemberdayaan UKM pada periode 2015-2018 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dan program CSR yang dipilih dalam penelitian ini adalah Program UKM Bogasari karena melihat tujuan dari program

CSR ini yang memiliki kesamaan dengan tujuan dari program pemberdayaan UKM oleh Pemerintah Indonesia.

Untuk memberikan gambaran mengenai kontribusi dari program UKM Bogasari, maka lokasi penelitian yang digunakan sebagai referensi adalah wilayah Jakarta, dimana salah satu data yang digunakan di dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan perwakilan dari Paguyuban Mie Ayam Tunggal Rasa yang merupakan paguyuban pedagang mie ayam di Jakarta yang memiliki anggota aktif sebanyak 52 orang pelaku UKM.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dan uraian permasalahan yang ditemukan dalam identifikasi masalah yang kemudian dibatasi dalam pembatasan masalah, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan oleh peneliti adalah: **"Bagaimana kontribusi Program UKM Bogasari dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UKM di Indonesia?"**

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kontribusi dari program UKM Bogasari dalam mendukung pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
2. Dalam tataran teori, mendeskripsikan aplikasi dari teori-teori terkait program CSR untuk menjelaskan Program UKM Bogasari.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini memiliki kegunaan untuk menambah wawasan peneliti terkait usaha kecil dan menengah (UKM), praktek dari program CSR, dan manfaat dari program CSR bagi perusahaan serta penerima program tersebut.
2. Bagi penelitian-penelitian berikutnya dalam bidang ekonomi politik internasional, besar harapan peneliti bahwa penelitian ini akan bisa menjadi referensi atau rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

1.6 Kajian Literatur

Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI) oleh Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.1, No.3, Februari 2013

Di dalam literatur ini, dilakukan sebuah penelitian mengenai peran dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Pemerintah melalui salah satu BUMN nya yaitu Bank BRI dan dampaknya kepada pengembangan UMKM yang ada di Kota Medan. Literatur ini menyebutkan mengenai peran dari UMKM terhadap perekonomian Indonesia, potensi yang dimiliki, karakteristik hingga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh mereka. Salah satu temuan yang terdapat di dalam literatur ini adalah program KUR memiliki dampak yang cukup signifikan kepada pendapatan yang diterima oleh para pelaku UKM. Semakin besar jumlah modal kredit yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang didapatkan.

Yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah segi aktor dimana di dalam literatur ini aktor yang terlibat dalam pemberdayaan UKM adalah aktor negara yang diwakili oleh Pemerintah. Sedangkan, dari wilayah penelitian pun mengalami perbedaan dimana dalam literatur ini wilayah penelitian yang diambil adalah di Kota Medan.

Peran Dunia Usaha Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Indonesia oleh Hersugondo dalam Fokus Ekonomi, Agustus 2009 Vol.8, No.2, Hal. 97-105.

Literatur ini melakukan eksplorasi pembahasan mengenai peran yang dapat dijalankan oleh dunia usaha untuk turut berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Di dalam literatur ini disebutkan bahwa kemiskinan di Indonesia merupakan sebuah permasalahan yang harus diselesaikan dan merupakan tanggungjawab bersama dari seluruh elemen yang ada di masyarakat bersama dengan pemerintah. Partisipasi dari dunia usaha yang disebutkan di dalam literatur ini adalah melalui program CSR dalam bentuk program *community development* yang berorientasi kepada pemberdayaan dari masyarakat yang pada akhirnya dapat membantu bangkitnya perekonomian nasional.

Yang membedakan penelitian ini dengan literatur ini adalah dalam konteks pembahasan dimana dalam literatur ini tidak disebutkan secara spesifik bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh aktor dunia usaha, sedangkan dalam penelitian ini bentuk pemberdayaan yang diambil adalah dalam bentuk kemitraan yang dilakukan oleh dunia usaha dengan para pelaku UKM di Indonesia.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan oleh Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah dalam Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol.2, No.2, September 2014, Hal.103-220.

Literatur ini memiliki tujuan untuk melakukan analisa dan deskripsi pemberdayaan UMKM sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Lokasi yang dipilih di dalam literatur ini adalah di Kabupaten Pasuruan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah hanya sebatas pemberian modal usaha saja dan kurang maksimal dalam hal pengembangan usaha. Lebih lanjut lagi, disebutkan bahwa keberhasilan pemberdayaan dikarenakan oleh beberapa faktor seperti sumber daya manusia yang melimpah, bahan baku yang mudah. Namun, disebutkan juga mengenai faktor-faktor penghambat berkembangnya UMKM di Pasuruan seperti infrastruktur yang memadai, kurang maksimalnya bantuan dari pemerintah, dan tidak adanya sentra pemasaran hasil produksi. Yang membedakan penelitian ini adalah dari segi aktor yang terlibat, dimana dalam literatur ini aktor yang terlibat dalam pemberdayaan adalah aktor negara. Selain itu, wilayah penelitian juga mengalami perbedaan.

Penelitian ini menjadikan ketiga literatur tersebut sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini sekaligus untuk menjadi pembanding antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Literatur pertama berbicara mengenai peran pemerintah melalui program KUR dalam pengembangan UKM di Kota

Medan, literatur kedua berbicara mengenai potensi peran yang dapat diberikan oleh dunia usaha dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, dan literatur ketiga membahas mengenai pemberdayaan UKM untuk menanggulangi kemiskinn. Namun, di dalam ketiga literatur tersebut belum ada yang membahas mengenai implementasi dari suatu program CSR untuk memberdayakan UKM dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, secara subjek penelitian ini berbeda dengan ketiga literatur tersebut. Dalam penelitian ini memfokuskan mengenai peran dari PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melalui program CSR nya untuk memberdayakan UKM yaitu Program UKM Bogasari. Lebih lanjut lagi, ketiga literatur tersebut belum ada yang melakukan pembahasan mengenai pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh aktor dunia usaha, dan terbatas hanya pembahasan mengenai peran dari pemerintah dalam melakukan pemberdayaan UKM. Selain itu, ketiga literatur tersebut belum ada yang mengkaitkan dengan pemberdayaan UKM dengan teori dan konsep-konsep terkait program CSR dan kontribusinya dalam mendukung pemberdayaan UKM. Sehingga besar harapan penulis, kelak penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

1.7 Kerangka Pemikiran

Pada awal kemunculannya sebagai suatu ilmu pada abad ke-19, hubungan internasional (HI) merupakan studi yang memfokuskan kajiannya kepada interaksi antar negara.¹⁰ Chris Brown dan Kirsten Ainley menyebutkan bahwa HI adalah studi tentang hubungan negara dengan negara (*relations of states*).¹¹ Definisi yang sama juga diutarakan oleh Joshua Goldstein yang menyebutkan bahwa HI merupakan hubungan antarpemerintah dengan pemerintah di dunia.¹² Sehingga pada awal kemunculannya, aktor yang menjadi kajian dalam studi ini adalah aktor negara atau *states*.¹³

Seiring dengan perkembangan dan implikasi dari perubahan-perubahan yang terjadi di dunia, maka terjadi peningkatan antar interaksi dari aktor-aktor lain di luar negara atau *non-state actors*. Interaksi yang terjadi antar aktor-aktor ini memiliki intensitas yang lebih tinggi dibandingkan hubungan resmi antar negara. Hal ini kemudian berdampak kepada transformasi dari definisi yang dimiliki oleh HI.¹⁴ Peu Ghosh kemudian menyatakan bahwa HI merupakan studi tentang

¹⁰ Bob S. Hadiwinata, (2007), *Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: Dari Realisme Hingga Konstruktivisme* dalam Yulius P. Hermawan, (2007), *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal.1.

¹¹ Chris Brown dan Kirsten Ainley, (2009), *Understanding International Relations*, New York: Palgrave Macmillan, hal.3.

¹² Joshua S. Goldstein, 2013, *International Relations*, London: Pearson Longman, hal.29.

¹³ Bob S. Hadiwinata, (2007), *Op.Cit.*, hal.16.

¹⁴ Dr. Umar Suryadi Bakry, (2017), *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, Depok: Penerbit Kencana, hal.3.

masalah-masalah luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara, termasuk peran aktor non-negara seperti organisasi internasional (OI), organisasi non-pemerintah (NGO), dan perusahaan multinasional (MNC).¹⁵ Robert Jackson dan Georg Sorensen juga mengutarakan definisi yang sama dimana menurut mereka studi HI merupakan studi tentang hubungan dan interaksi antar negara, termasuk aktivitas-aktivitas dan kebijakan-kebijakan pemerintah nasional, organisasi-organisasi internasional, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional.¹⁶ Dengan demikian, maka kini studi HI memasuki suatu babak baru dimana sudah tidak lagi terbatas dalam membahas mengenai interaksi antar negara saja, tetapi juga melakukan kajian terhadap hubungan antar negara, negara dengan aktor non-negara, hingga isu-isu global yang menjadi bagian dari studi ini.

Dalam studi HI, aktor dapat memiliki bentuk negara (*states actor*) maupun aktor-aktor non-negara (*non-states actor*).¹⁷ Negara dalam menjalankan perannya dalam HI diwakili oleh pemerintah yang sedang berkuasa, dan *non-states actor* adalah setiap entitas yang berpartisipasi atau bertindak dalam hubungan internasional.¹⁸ Bentuk-bentuk dari *non-states actor* dapat berupa *international organizations* (IOs), *Non-Governmental Organizations* (NGOs), *Multinational Corporations* (MNCs) dan dunia bisnis, kelompok-kelompok masyarakat, hingga individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dinamika HI dan politik

¹⁵ Peu Ghosh, (2015), *International Relations*, New Delhi: PHI Learning Private Ltd, hal.1.

¹⁶ Robert Jackson dan Georg Sorensen, (2013), *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, Oxford: Oxford University Press, hal.4.

¹⁷ Peu Ghosh, (2015), *Op.Cit.*, hal.70.

¹⁸ Dr. Umar Suryadi Bakry, (2017), *Op.Cit.*, hal.184.

internasional. Eksistensi dari aktor non-negara dimulai pasca Perang Dunia II yang kemudian memainkan peran penting dalam berbagai masalah internasional.¹⁹ Aktor non-negara seperti aktor dari dunia usaha yang diwakili oleh perusahaan multinasional dikarenakan oleh aktivitasnya untuk melakukan *foreign direct investment* dapat mempengaruhi politik di suatu negara, atau aktivitas yang dilakukan oleh individu seperti yang dilakukan oleh Edward Snowden yang membahas permasalahan espionase kemudian dapat mempengaruhi dinamika dalam HI.

Selain perkembangan dari segi aktor dalam studi HI, isu-isu yang dibahas pun juga turut serta mengalami perkembangan seiring dengan terjadinya perubahan-perubahan sebagai bagian dari isu modern. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada awal kemunculannya studi HI memfokuskan diri kepada kajian mengenai interaksi antar negara, maka dengan demikian isu yang menjadi pokok bahasan pun hanya terbatas kepada isu terkait politik luar negeri, keamanan, dan peperangan. Namun, seiring dengan terjadinya perubahan dan perluasan dalam studi HI maka muncul isu-isu baru dalam studi HI yang kemudian dikenal sebagai isu global (*global issues*). Isu ini muncul seiring dengan meningkatnya interdependensi internasional yang membuat isu-isu tersebut memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya.²⁰ Namun, tidak semua isu dapat dikatakan sebagai suatu isu global. John L. Seitz dan Kristen A. Hite menyebutkan setidaknya ada tiga prasyarat agar suatu isu dapat menjadi bagian dari isu-isu global

¹⁹ *Ibid.*, hal.186.

²⁰ John L. Seitz dan Kristen A. Hite, (2012), *Global Issues: An Introduction 4th Ed.*, Oxford: John Wiley & Sons Ltd., hal.1.

yaitu: (i) melibatkan kehidupan orang banyak. (ii) tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. (ii) memiliki saling keterhubungan antar satu isu dengan isu lainnya.²¹ Gilda Wheeler menyebutkan bahwa isu global bersifat transnasional atau melintasi batas negara dan berada di luar kemampuan suatu negara untuk menyelesaikannya. Selain itu, isu global juga memiliki sifat saling terhubung yang berarti perubahan di suatu tempat memberikan tekanan untuk perubahan di tempat lainnya.²² Salah satu isu menjadi bagian dari isu global di era modern ini adalah isu terkait kemiskinan. Penelitian ini akan memfokuskan diri dalam pembahasan mengenai isu kemiskinan dan upaya-upaya untuk mendukung pengentasan kemiskinan oleh dunia usaha melalui program-program CSR.

John L. Seitz dan Kristen A. Hite menyebutkan berdasarkan sejarah , manusia pada dasarnya miskin dan hanya segelintir individu saja yang memiliki standar hidup yang lebih baik. Namun, sebagian besar manusia di bumi hidup dalam kondisi kemiskinan yang sama. Perubahan fundamental terjadi seiring dengan terjadinya revolusi industri dimana fenomena ini menciptakan kekayaan baru bagi negara-negara industri di Eropa. Peristiwa ini kemudian menjadi penyebab munculnya kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Beberapa negara yang mengalami industrialisasi kemudian mengalami peningkatan standar hidup dan kemudian memisahkan diri dari kelompok negara yang masih tertinggal.²³

²¹ John L. Seitz dan Kristen A. Hite, (2012), *Ibid.*

²² Gilda Wheeler, *Global Issues - Global Oppurtuneits: Population, Poverty, Consumption, Conflict, and The Environment*, <http://clearingmagazine.org/archives/979> diakses pada 23 Desember 2018.

²³ John L. Seitz dan Kristen A. Hite, (2012), *Op.Cit.*, hal.44.

Kemiskinan memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai seorang individu. Ketika berbicara mengenai definisi dari kemiskinan maka ada tiga konsep yang muncul untuk membicarakan isu ini yaitu *extreme atau absolute poverty*, *moderate poverty*, dan *relative poverty*. *Absolute poverty* memiliki arti sebagai ketidakmampuan sebuah rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk hidup. *Moderate poverty* merujuk kepada kualitas hidup dari seorang individu yang nyaris tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan *relative poverty* merujuk kepada kondisi pendapatan dari sebuah rumah tangga yang berada di bawah standar nasional.²⁴ Pemerintah Indonesia melalui BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan.²⁵ Untuk menentukan siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin, maka World Bank menyusun sebuah standar untuk menentukan hal tersebut dengan menggunakan kriteria pendapatan yang diterima oleh seorang individu atau biasa dikenal sebagai *poverty line*. Pada saat pertama kali *standar* ini dirilis, angka yang digunakan oleh World Bank adalah 1 US\$ per hari, namun pada tahun 2008 mengalami revisi menjadi 1.25 US\$ dan pada tahun 2015 mengalami revisi kembali menjadi 1.9 US\$ per hari-nya.²⁶ Metode yang sama juga digunakan

²⁴ Jeffrey Sachs, (2006), *The End of Poverty: Economic Possibilities of Our Time*, New York; The Penguin Press, hal.20.

²⁵ BPS, *Kemiskinan dan Ketimpangan*, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> diakses pada 5 Januari 2018.

²⁶ World Bank, *FAQs: Global Poverty Line Update*, <http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq> diakses pada 5 November 2018.

oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan pengukuran mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia, dimana Pemerintah Indonesia menerapkan garis kemiskinan di Indonesia sebesar Rp. 401.220 per kapita per bulannya.²⁷ Bila berada di bawah kategori tersebut maka termasuk kategori miskin menurut Pemerintah Indonesia.

Dalam memetakan kemiskinan secara global, maka terdapat suatu klasifikasi bagi negara-negara berdasarkan kondisi perekonomiannya yaitu *developed countries* yang merujuk kepada negara kaya dan maju dalam bidang industri, *developing countries* untuk merujuk kepada negara yang ekonominya sedang mengalami pertumbuhan dan *least developed countries* (LDCs) untuk merujuk kepada negara miskin yang ditandai dengan absennya industri dan tingginya jumlah masyarakat miskin di negara tersebut.²⁸ Menurut Stiglitz, yang membedakan antara *developed* dan *less developed countries* selain adanya kesenjangan dalam sumber daya yang dimiliki, juga terdapat kesenjangan dalam bentuk pengetahuan yang dimiliki.²⁹ Indonesia sendiri merupakan salah satu bagian dari negara-negara berkembang. Michael Todaro dan Stephen C. Smith menyebutkan beberapa karakteristik dari negara berkembang yaitu: (i) tingkat kehidupan dan produktifitas yang rendah (ii) tingkat sumber daya manusia yang

²⁷ BPS, *Kemiskinan dan Ketimpangan*, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> diakses pada 5 Januari 2018.

²⁸ Nancy Dzedzic, (2006), *World Poverty*, Farmington Hills: Thomson Gale, hal.6.

²⁹ Joseph E. Stiglitz, (2006), *Making Globalization Work*, New York: W.W. Norton & Co, hal.28.

rendah (iii) tingkat kesenjangan dan *absolute poverty* yang tinggi (iv) tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi (v) fraksionalisasi sosial yang tinggi (vi) populasi wilayah rural yang tinggi dengan urbanisasi yang tinggi (vii) tingkat industrialisasi yang rendah (viii) kondisi geografi yang kurang menguntungkan (ix) pasar finansial yang belum matang (x) terdapat sisa-sisa kolonialisasi seperti institusi yang tidak memadai dan ketergantungan kepada pihak eksternal.³⁰

Berbicara mengenai penyebab terjadinya kemiskinan, John L. Seitz dan Kristen A. Hite menyebutkan bahwa revolusi industri yang terjadi di Eropa pada abad ke-17 membawa perubahan fundamental dalam distribusi kekayaan.³¹ Argumentasi ini juga diutarakan oleh Jeffrey Sachs, dimana ia menyatakan bahwa revolusi industri yang terjadi di Eropa kemudian mengalami penyebaran hampir ke seluruh dunia dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi secara global.³² Namun, ada beberapa negara yang tidak dapat menikmati pertumbuhan ekonomi ini dan menyebabkan mereka untuk terjebak dalam kondisi miskin.

Jeffrey Sachs menyebutkan ada beberapa alasan mengapa suatu negara mengalami kesulitan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka yaitu: (i) jebakan kemiskinan dimana masyarakat suatu negara berada dalam kondisi miskin dan tidak mampu untuk membawa negara tersebut keluar dari kemiskinan. (ii) kondisi geografis yang menantang (iii) jebakan fiskal dimana pemerintah suatu negara tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan investasi

³⁰ Michael Todaro dan Adam C. Smith, (2011), *Economic Development 11th Ed.*, Boston: Addison-Wesley, hal.38.

³¹ John L. Seitz dan Kristen A. Hite, (2012), *Loc.Cit.*.

³² Jeffrey Sachs, (2006), *Op.Cit.*, hal.39.

dalam infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. (iv) kegagalan dari pemerintah yang tidak bisa menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. (v) hambatan budaya (vi) kondisi geopolitik seperti hambatan perdagangan yang diterapkan oleh pihak eksternal (vii) minimnya inovasi dan (viii) jebakan demografis seperti masalah populasi.³³ Stiglitz juga menyebutkan bahwa salah satu penghambat pertumbuhan adalah keterbatasan dalam aspek pengetahuan dan teknologi.³⁴

Kemiskinan yang dialami oleh seseorang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan akses terhadap berbagai sumber daya seperti: (i) Sumber daya manusia seperti kesehatan, nutrisi, dan kemampuan untuk menjadi produktif. (ii) Sumber daya bisnis seperti mesin-mesin yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas produksi. (iii) infrastruktur. (iv) Sumber daya alam seperti lahan yang produktif dan lingkungan yang sehat untuk mendorong produktivitas manusia. (v) Institusi publik dalam bentuk peraturan dan undang-undang yang dapat mendorong aktivitas perekonomian. (vi) Ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengolah sumber daya yang dimiliki serta meningkatkan produktivitas ekonomi dari seorang individu.³⁵ Stiglitz juga menyebutkan dalam beberapa kasus seperti yang dialami oleh negara berkembang, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti liberalisasi

³³ Jeffrey Sachs, (2006), *Op.Cit.*, hal. 56-66.

³⁴ Joseph. E. Stiglitz, (2006), *Loc.Cit.*.

³⁵ Jeffrey Sachs, (2006), *Op.Cit.*, hal.244-245.

perdagangan secara cepat dan liberalisasi pasar modal yang terjadi terlalu cepat seperti yang dilakukan oleh IMF.³⁶

Melihat urgensi yang ditimbulkan oleh isu kemiskinan, maka isu ini kemudian diadopsi menjadi salah satu *goals* dalam *sustainable development goals* (SDGs) dimana terkait kemiskinan menduduki *goals* nomor satu yaitu *no poverty*. Di dalam *goals* ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi sebelum tahun 2030.³⁷ Menurut Michael Todaro, Kemiskinan sebagai suatu isu memiliki dua dimensi di dalamnya yaitu: (i) dimensi ekonomi yang berkaitan dengan kurangnya sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang dan (ii) dimensi sosial yang berkaitan dengan kekurangan jaringan sosial dan struktur sosial yang dibutuhkan oleh seseorang untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahtraannya.³⁸

Orgaization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan bahwa isu kemiskinan setidaknya memiliki lima dimensi didalamnya yaitu: (i) dimensi ekonomi yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memperoleh pendapatan, melakukan aktivitas konsumsi dan memiliki aset-aset (ii) dimensi kesejahteraan manusia dalam bentuk kesehatan, pendidikan, nutrisi, tempat tinggal, dan air bersih (iii) dimensi politik yang berkaitan dengan hak asasi manusia

³⁶ Joseph E. Stiglitz, (2002), *Globalitzation and It's Discontent*, New York: W.W Norton & Co, hal.17.

³⁷ UNDP, *Goals No.1: No Poverty*, <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html> diakses pada 23 Desember 2018.

³⁸ Michael Todaro, (1977), *Economic Development in The Third World*, New York: Longman Inc, hal.67.

dan kemampuan seseorang menyampaikan pendapatannya (iv) dimensi sosial-kultural yang merupakan kemampuan seseorang untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas (v) dimensi kapabilitas proteksi dari berbagai tantangan ekonomi dan eksternal seperti perang, penyakit, kriminalitas, dan sebagainya.³⁹

Untuk menyelesaikan isu kemiskinan, Jeffrey Sachs muncul dengan sebuah strategi yaitu dengan melakukan investasi kunci pada manusia dan pada infrastruktur.⁴⁰ Menurut Sachs, kelompok masyarakat miskin memiliki kekurangan sumber daya dalam setidaknya enam aspek yaitu: (i) sumber daya manusia (ii) sumber daya bisnis (iii) infrastruktur (iv) sumber daya alam (v) institusi publik (vi) pengetahuan.⁴¹ Ia menyebutkan bahwa salah satu cara bagi kelompok miskin untuk dapat keluar dari jebakan kemiskinan adalah dengan memenuhi kekurangan dalam sumber daya-sumber daya tersebut, namun dalam prosesnya sumber daya tersebut memiliki kemungkinan untuk berkurang atau hilang dalam proses pemenuhannya. Menurut OECD, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ada lima area kebijakan yang dapat menjadi solusi yaitu: (i) akumulasi yang merupakan investasi dalam hal-hal seperti infrastruktur dan sumber daya manusia seperti pengetahuan dan kesehatan. (ii) inovasi dalam bentuk hal baru atau cara-cara baru untuk melakukan sesuatu sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. (iii) alokasi dengan memberikan kebebasan kepada pasar untuk mengalokasikan sumber daya yang ada

³⁹ OECD, (2012), *From Aid to Development: The Global Fight Against Poverty*, OECD Insights: OECD Publishing, hal.33-34.

⁴⁰ Jeffrey Sachs, (2006), *Op.Cit.*, hal.227.

⁴¹ *Ibid.*, hal.244-245.

(iv) stabilisasi dengan menjaga kondisi perekonomian dari inflasi atau perubahan-perubahan dalam ekonomi yang ekstrim dan tak terduga.⁴²

Oleh karena itu dibutuhkan bantuan-bantuan dalam bentuk *official development assistance* (ODA) seperti dalam bentuk *foreign aid* sehingga memungkinkan bagi suatu negara untuk keluar dari jebakan kemiskinan. Kehadiran dari bantuan ini memicu proses akumulasi sumber daya yang dibutuhkan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.⁴³ ODA sendiri merupakan sebuah konsep dalam HI yang merupakan pemberian bantuan dari suatu negara donor kepada negara lainnya untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka.⁴⁴ Bantuan ini memiliki peranan penting untuk menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan di negara-negara penerima donor.⁴⁵ Esensi dari *development assistance* adalah untuk memberikan bantuan kepada pihak lain untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya. Joseph Stiglitz menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan isu kemiskinan diperlukan semakin banyaknya pemberian-pemberian bantuan atau *assistance* untuk membantu mengentaskan kemiskinan.⁴⁶

Pengentasan secara etimologis memiliki arti sebagai cara untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik.⁴⁷ Jeffrey Sachs menyebutkan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan atau memperbaiki kemiskinan, maka diperlukan

⁴² OECD, (2012), *Op.Cit.*, hal.29-30.

⁴³ Jeffrey Sachs, (2006), *Op.Cit.*, hal.246.

⁴⁴ John L. Seitz dan Kristen A. Hite, (2012), *Op.Cit.*, hal.52.

⁴⁵ Jeffrey Sachs, (2006), *Op.Cit.*, hal.339.

⁴⁶ Joseph E. Stiglitz, (2006), *Op.Cit.*, hal.14.

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Pengentasan*, <https://kbbi.web.id/entas> diakses pada 7 Januari 2019.

partisipasi dari pemerintah dan aktor dari dunia usaha dimana pemerintah dan aktor dari dunia usaha harus membagi peran yang mereka mainkan dimana pemerintah menjalankan perannya untuk melakukan investasi di dalam bidang-bidang publik seperti sarana edukasi, kesehatan dan infrastruktur sedangkan aktor dari dunia usaha melakukan investasi dalam bidang bisnis dikarenakan oleh pengalaman dan kemampuan yang mereka miliki untuk menjalankan usaha.⁴⁸ Konsep *development assistance* dapat dipakai untuk menjelaskan kontribusi dunia usaha atau aktor-aktor non negara lainnya. dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan yaitu melalui konsep *private aid*. Kehadiran dari aktor-aktor yang memberikan bantuan untuk menyelesaikan isu kemiskinan dirujuk oleh OECD sebagai *new development actors*.⁴⁹ Konsep ini memungkinkan bagi suatu kelompok elemen masyarakat untuk terlibat dalam upaya-upaya bantuan pembangunan secara langsung kepada kelompok yang memerlukan bantuan.⁵⁰ Salah satu bentuk *private aid* yang dapat diberikan oleh dunia usaha adalah melalui program CSR atau dalam sebutan OECD disebut sebagai *private philanthropy* yang memiliki tujuan untuk berkontribusi kepada masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan. ⁵¹ Joseph Stiglitz menyebutkan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selain peran dari pasar, pemerintah, dan individu juga diperlukan peran dari komunitas dimana

⁴⁸ Jeffrey Sachs, (2006), *Op.Cit.*, hal.252-254.

⁴⁹ OECD, (2012), *Op.Cit.*, hal.54.

⁵⁰ Lars Engberg-Pedersen dan Neil Webster, et.al., '*Corporatism and The Development of Private Aid Organizations in Denmark*' dalam Paul Hoebink dan Lau Schulpfen, *Private Development in Europe*, Hampshire: Palgrave Macmillan, hal.44.

⁵¹ OECD, (2012), *Op.Cit.*, hal.59,

sebuah aktor membantu aktor lainnya.⁵² Dunia usaha menurut Stiglitz merupakan bagian dari komunitas yang dimaksud sebelumnya.⁵³

Kehadiran dari berbagai isu global memiliki dampak bagi aktivitas bisnis dari para pelaku usaha. Aktivitas bisnis kini tidak lagi dapat hanya berfokus kepada aktivitas jual-beli saja, tetapi telah memasuki sebuah keadaan dimana kehadiran dari perusahaan mendapat berbagai tekanan dari pihak internal dan eksternal untuk turut berpartisipasi dalam isu-isu sosial dan lingkungan.⁵⁴ Sebagai contoh, isu kemiskinan dapat berdampak terhadap aktivitas bisnis perusahaan dimana perusahaan tidak dapat meningkatkan aktivitas ekonominya karena tidak ada daya beli dari pihak konsumen, atau isu ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi aktivitas produksi dari suatu perusahaan. Oleh karena itu diperlukan sebuah pendekatan untuk dapat menjelaskan bagaimana suatu perusahaan atau aktor dari dunia bisnis dapat berkontribusi terhadap dalam menghadapi berbagai isu-isu global yang ada. Oleh karena itu, R. Edward Freeman kemudian muncul dengan sebuah pendekatan yang disebut sebagai *stakeholders theory* untuk menjawab pertanyaan tersebut. Melalui teori ini, Freeman menyebutkan bahwa aktivitas bisnis tidak dapat lagi hanya berpusat pada kepentingan-kepentingan dari pemegang saham saja namun juga perlu memperluas perhatiannya sehingga mencakup kepentingan dari kelompok-kelompok kepentingan lainnya dari suatu perusahaan.⁵⁵

⁵² Joseph E. Stiglitz, (2006), *Op.Cit.*, hal.51.

⁵³ *Ibid.*, hal.198.

⁵⁴ R. Edward Freeman, (1984), *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Masschusets: Pitman Publishing, hal.8-22.

⁵⁵ R. Edward Freeman et.al., (2010), *Stakeholder Theory: The State of The Art*, Cambridge: Cambridge University Press, hal.242.

Freeman mendefinisikan *stakeholders* dari sebuah perusahaan sebagai seluruh kelompok kepentingan yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas bisnis dari suatu perusahaan.⁵⁶ *Stakeholders* dari sebuah perusahaan dapat memiliki bentuk pekerja, konsumen, *supplier*, pemegang saham, bank, kaum pemerhati lingkungan, pemerintah hingga kompetitor.⁵⁷

Dalam aplikasinya, Freeman menyebutkan bahwa terdapat tiga tingkatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk terhubung dengan para *stakeholders*-nya yaitu: tingkatan rasional dengan melakukan identifikasi siapa saja yang menjadi *stakeholders* dari perusahaan tersebut, tingkatan proses dengan melakukan penyusunan prosedur dan cara terhubung dengan para *stakeholders*, dan tingkatan transaksional dalam bentuk interaksi dengan para *stakeholders*.⁵⁸ Lebih lanjut lagi, prinsip dari *stakeholders theory* adalah *voluntarism* dimana perusahaan secara sukarela memasukkan kepentingan dari seluruh *stakeholders* sebagai bagian dari aktivitas bisnis perusahaan.⁵⁹ Salah satu bentuk aplikasi dari *stakeholders theory* adalah melalui keterlibatan suatu perusahaan dalam menjalankan program CSR.

Program CSR merupakan bagian dari aktivitas bisnis perusahaan dimana perusahaan mencoba untuk menaruh nilai-nilai sosial kedalam aktivitas bisnis mereka, sehingga selain menjalankan fungsinya sebagai unit *profit maximizing*, perusahaan juga berkontribusi terhadap keberlangsungan dari *stakeholders*

⁵⁶ R. Edward Freeman, (1984), *Op.Cit.*, hal.52.

⁵⁷ *Ibid.*, hal.vi.

⁵⁸ *Ibid.*, hal.64-74.

⁵⁹ *Ibid.*, hal.74.

mereka.⁶⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi memiliki arti sebagai sumbangan.⁶¹ Sehingga maksud dari program CSR apabila dilihat berdasarkan definisinya adalah untuk memberikan sumbangan kepada keberlangsungan dari *stakeholders* perusahaan.

Berdasarkan prinsipnya, menurut James E. Post dkk, suatu program CSR memiliki dua prinsip di dalamnya yaitu: (i) *charity principle* dan (ii) *stewardship principle*. Prinsip *charity* berangkat dari argumen "masyarakat yang kaya harus membantu yang miskin", kemudian langkah yang dapat ditempuh oleh perusahaan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan lebih adalah dengan berpartisipasi di dalam kegiatan masyarakat melalui kontribusi sukarela. Prinsip kedua yaitu *stewardship principle* memiliki makna dimana perusahaan melihat dirinya sebagai seorang *steward* atau pengasuh sehingga memiliki kewajiban untuk menciptakan keadaan yang saling menguntungkan dengan membantu kelompok masyarakat yang lebih kecil.⁶²

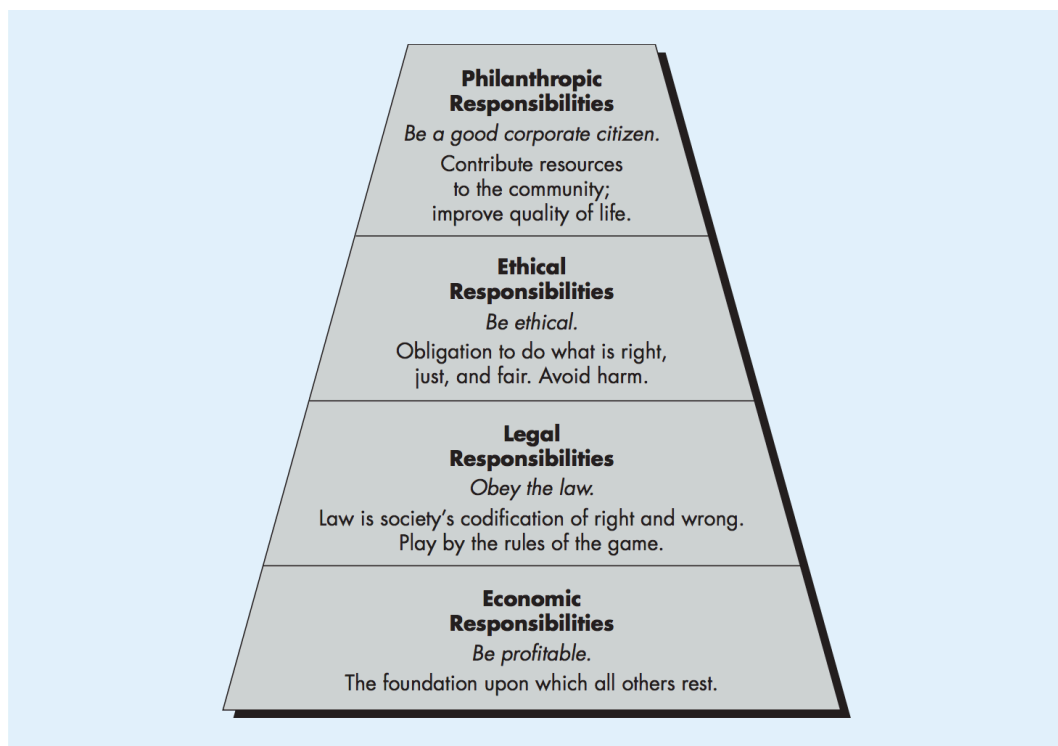
Kehadiran dari program CSR menurut Archie B. Carroll dan Ann K. Buchholtz merupakan bentuk implementasi dari *philantrophical responsibilities* yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Namun sebelum dapat sampai ke tahapan ini, suatu perusahaan perlu untuk melaksanakan tiga tanggung jawab lain terlebih

⁶⁰ David Crowther dan Nicholas Capaldi, (2008), *Introduction: An Agenda for Research* dalam buku *The Ashgate Research Companion to Corporate Social Responsibility*, Ashgate, hal. 3.

⁶¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Kontribusi*, <https://kbbi.web.id/kontribusi> diakses pada 1 Januari 2019.

⁶² James E. Post, Anne T. Lawrence, dan James Weber, (1999), *Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, Boston: Mc-Graw-Hill, hal.59.

dahulu menurut Carroll dan Buchholtz yaitu (i) *economical responsibilities* yang merupakan tanggungjawab utama dari suatu perusahaan yaitu untuk menguasai pasar dan maksimalisasi profit. (ii) *legal responsibilities* dengan menjalankan bisnis sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku. (iii) *ethical responsibilities* yang merupakan kewajiban perusahaan untuk mentaati etika dalam berbisnis. Setelah menjalankan tiga tanggungjawab tersebut, baru suatu perusahaan dapat melakukan *philanthropical responsibilities*-nya melalui partisipasi perusahaan dalam kegiatan kemasyarakatan secara sukarela.⁶³ Untuk menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam suatu program CSR maka Carroll dan Buchholtz menyusun piramida CSR yang berisikan tahapan tersebut.



⁶³ Archie B. Carroll dan Ann K. Buchholtz, (2008), *Business and Society 7th ed.*, Ohio: South-Western Cengage Learning, hal. 39-40.

Gambar 1: Piramida CSR. ((Sumber: Archie B. Carroll dan Ann K. Buchholtz,(2008), *Business and Society 7th ed.*, Ohio: South-Western Cengage Learning,hal.45)

Kehadiran dari program CSR merupakan bagian dari konsep *triple bottom line* yang diutarakan oleh John Elkington. Konsep ini merupakan sebuah kerangka kerja yang menilai dampak dari aktivitas bisnis perusahaan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan atau *people, enviromental, dan profit*. Dalam aspek *profit*, Elkington berbicara mengenai fungsi dari suatu perusahaan yaitu untuk mendapatkan keuntungan, dalam aspek *enviromental* berbicara mengenai dampak dari aktivitas bisnis terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, dan aspek terakhir yaitu *people* berbicara mengenai dampak dari aktivitas bisnis kepada lingkungan sosial di sekitar perusahaan.⁶⁴ Menurut Elkington, keberhasilan dari suatu perusahaan tidak dapat dinilai dari keberhasilan secara ekonomi saja tetapi juga harus dilihat dari aspek sosial dan lingkungan.⁶⁵

Salah satu bentuk aplikasi dari program CSR yang dapat berfungsi sebagai *private aid* dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia adalah melalui pembentukan kemitraan antara perusahaan besar dengan pelaku UKM. Tulus Tambunan menyebutkan bahwa kehadiran dari pelaku UKM memiliki peranan yang penting bagi perekonomian negara-negara di Asia dikarenakan oleh kontribusi yang diberikan oleh sektor ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan,

⁶⁴ John Elkington, (1997), *Cannibal With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Oxford: Capstone Publishing Ltd., hal.69-92.

⁶⁵ John Elkington, Harvard Business Review, *25 Years Ago I Coined The Phrase "Triple Bottom Line". Here's Why It's Time To Rethink It.*, <https://hbr.org/2018/06/25-years-ago-i-coined-the-phrase-triple-bottom-line-heres-why-im-giving-up-on-it> diakses pada 5 Januari 2018.

meningkatkan distribusi pendapatan, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan aktivitas ekspor, serta mendorong munculnya *entrepreneur* baru dan mendorong aktivitas ekonomi di wilayah *rural*.⁶⁶ Charles Havie juga menyebutkan bahwa bagi negara sedang berkembang, kehadiran dari UKM memiliki peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara.⁶⁷ Peran dari sektor UKM juga dirasakan oleh Pemerintah Indonesia, dimana salah satu strategi untuk mengentaskan kemiskinan yang disusun dalam RPJMN 2015-2019 adalah melalui pemberian insentif kepada para pelaku UKM.⁶⁸ Sehingga, program CSR dalam bentuk kemitraan antara perusahaan dengan pelaku UKM dapat menjadi kontribusi dari dunia usaha dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Secara etimologis, kemitraan diadopsi dari kata *partnership* yang dapat diterjemahkan sebagai persekutuan atau perkongsian. Maka, secara makna kemitraan dapat diartikan sebagai persekutuan antar dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.⁶⁹ Oleh karena itu, persyaratan dari suatu kemitraan dapat diuraikan sebagai berikut: (i) ada dua pihak atau lebih (ii) memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan (iii) ada kesepakatan (iv) saling membutuhkan, sehingga sifat dari

⁶⁶ Tulus Tambunan, (2009), *Loc. Cit.*

⁶⁷ Charles Havie, (2005), *Loc. Cit.*

⁶⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Buku I, Bab.4 hal.11.

⁶⁹ Dra. Ambar Teguh Sulistiyani, M.si, (2017), *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan Edisi Kedua*, Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, hal.129.

sebuah kemitraan hendaknya saling memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra dan status dari pihak-pihak yang terlibat adalah setara atau *subordinate*, memiliki kesamaan misi atau misi berbeda tapi saling melengkapi secara fungsional.⁷⁰

. Ambar Teguh Sulistiyani menyebutkan bahwa kemitraan yang dibentuk dapat dibagi ke tiga bentuk kemitraan yaitu: (i) *pseudo partnership* atau kemitraan semu (ii) *mutualism partnership* atau kemitraan mutualistik (iii) *conjugation partnership* atau kemitraan melalui peleburan atau pengembangan. Kemitraan semu merupakan sebuah kemitraan yang terjadi antara dua pihak atau lebih tapi tidak melakukan kerjasama sesungguhnya secara seimbang, kemitraan mutualistik merupakan bentuk kemitraan yang saling memberikan keuntungan antara pihak yang berpartisipasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik, dan kemitraan melalui peleburan yaitu bentuk kemitraan dimana ada dua pihak yang bermitra secara temporer untuk memberikan kemampuan lebih kepada masing-masing pihak.⁷¹ Di Indonesia, bentuk hubungan kemitraan antar perusahaan besar dengan pelaku UKM juga diatur oleh Pemerintah melalui adopsi unsur kemitraan dalam Undang-Undang (UU) No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dimana dalam UU ini perusahaan besar diwajibkan untuk membentuk kemitraan dengan pelaku UKM dalam berbagai bentuk.⁷²

⁷⁰ Ibid., hal.129-130.

⁷¹ Ibid., hal.130-131.

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

. Dikarenakan oleh sifat dari isu-isu global yang memiliki sifat *interconnected* (saling terhubung), maka dalam upaya untuk menyelesaikan isu tersebut diperlukan partisipasi dan kerjasama oleh berbagai aktor. Salah satunya adalah kerjasama yang dibentuk oleh pemerintah dengan dunia usaha, dimana kedua aktor tersebut dapat saling melengkapi dan mengisi berbagai keterbatasan yang dimiliki sehingga upaya-upaya untuk menyelesaikan suatu isu global dapat memberikan dampak yang maksimal. Di dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menggunakan konsep dan teori yang terdapat kerangka berpikir ini untuk menjadi panduan penulis guna menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana kontribusi dari Program UKM Bogasari dalam mendukung pemberdayaan UKM di Indonesia.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dalam bentuk studi kasus. John W. Cresswell menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu cara untuk melakukan eksplorasi dan pemahaman mengenai permasalahan sosial yang dialami oleh individu atau kelompok.⁷³ Lebih lanjut lagi, Cresswell menyebutkan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif antara lain: *natural setting* dimana peneliti terlibat langsung untuk mengalami isu atau permasalahan yang diteliti, peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian, sumber data yang beragam, sifat dari analisis bersifat induktif, memahami pemahaman yang diperoleh oleh partisipan dari penelitian, dan rencana awal dari penelitian tidak bersifat *saklek* dan terus mengalami perubahan seiring dengan terjadinya proses penelitian.⁷⁴

Metode studi kasus yang dipilih dalam penelitian ini adalah *single case studies*. Dalam fokus kajian *international political economy* (IPE), *single case studies* memiliki kelebihan dimana dapat menghasilkan teori baru yang memiliki validitas, dapat menghasilkan dasaran empiris untuk hipotesis yang lebih kuat dibandingkan dengan metode statistik, serta dapat memberikan gambaran mengenai suatu peristiwa yang lebih mendalam dibandingkan dengan metode

⁷³ John W. Cresswell, (2009), *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, California:Sage Publications, Inc., hal.4.

⁷⁴ John W. Cresswell, (2009), *Ibid.*, hal. 175-176.

alternatif lainnya.⁷⁵ Melalui metode ini, penulis memiliki kontrol atas objek dan fokus dari isu dari penelitian ini bersifat kontemporer, sehingga memungkinkan untuk digunakan metode studi kasus.⁷⁶

1.8.1 Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, metode penelitian kualitatif memungkinkan suatu penelitian untuk memiliki sumber yang beragam. Sehingga untuk menjawab pertanyaan penelitian dari penelitian ini diperlukan data yang aktual dan relevan. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, metode yang digunakan adalah melalui wawancara dengan narasumber terkait topik penelitian sekaligus data yang diperoleh melalui studi berbasis dokumen dan literatur.

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dengan perwakilan dari PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk., dilanjutkan dengan wawancara dengan perwakilan dari Paguyuban Mie Ayam Tunggal Rasa GARAMIRO yang berpartisipasi di dalam program Bogasari SME. Sedangkan untuk data sekunder, akan digunakan studi berbasis dokumen seperti buku, penelitian terdahulu, jurnal, serta dokumen-

⁷⁵ John S. Odell, (2004), *Case Study Methods in International Political Economy*, dalam Detlef F. Sprinz dan Yael Wolinsky-Nahmias, (2004), *Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations*, the University of Michigan Press:Michigan, hal.66-67.

⁷⁶ Robert K. Yin, (2008), *Studi Kasus: Desain & Metode*, Terj. M. Djauzi Mudzakir, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, hlm. 1.

dokumen lainnya. Dokumen-dokumen yang akan digunakan memiliki relevansi terhadap program CSR untuk dijadikan bahan acuan dari penelitian ini. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan metode lain yang berbasis internet sebagai referensi dan sumber data. Beberapa halaman internet seperti situs berita, website resmi, dan laporan-laporan lainnya akan digunakan secara komprehensif.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Identifikasi Masalah
- 1.3 Pembatasan Masalah
- 1.4 Perumusan Masalah
- 1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
 - 1.5.1 Tujuan Penelitian
 - 1.5.2 Kegunaan Penelitian
- 1.6 Kajian Literatur
- 1.7 Kerangka Pemikiran
- 1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Teknik Pengumpulan Data

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab II Penerapan Nilai Sosial kedalam Aktivitas Bisnis PT. Indofood Sukses Makmur Tbk

2.1 Nilai-Nilai dalam Aktivitas Bisnis PT. Indofood Sukses Makmur Tbk

2.2 Program CSR Sebagai Bentuk Aplikasi Nilai Sosial PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.

2.3 Program *Social and Community Development* PT. Indofood Sukses Makmur Tbk

2.3 Program UKM Bogasari

2.3.1 Bogasari *Baking Centre* (BBC)

2.3.2 Bogasari Mitra *Card* (BMC)

2.3.3 Wacana Mitra

Bab III Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Program Pemberdayaan UKM di Indonesia

3.1 Terkait Kemiskinan di Indonesia

3.2 Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

3.3 Usaha Kecil dan menengah di Indonesia

3.3.1 Program Pemberdayaan UKM di Indonesia

Bab IV Kontribusi Program CSR dalam Mendukung Pemberdayaan UKM di Indonesia

4.1 Kontribusi Program UKM Bogasari dalam Mendukung Pemberdayaan UKM di Indonesia

4.2 Aplikasi *Stakeholders Theory* dalam Program CSR PT. Indofood Sukses Makmur Tbk

4.3 Aplikasi *Charity Principle* dan *Stewardship Principle* Melalui Program CSR

Bab IV Kesimpulan

Daftar Pustaka